

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan adalah sebuah upaya terstruktur atau terencana oleh setiap negara untuk memperbaiki suatu keadaan yang mengarah lebih baik. Pembangunan dapat dilakukan melalui pengoptimalan pemanfaatan sumber daya yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Setiap negara memiliki potensi serta tantangan yang berbeda-beda, maka diperlukan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut agar terciptanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (RPJMN, 2019). Pada Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan, Indonesia adalah Negara Kesatuan yang terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsinya tersebut terbagi lagi menjadi daerah Kabupaten/Kota. Dalam tiap daerahnya itu memiliki pemerintahan daerah yang diatur pada peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kewenangan perundang-undangan tersebut, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjalankan aktivitas pembangunan di masing-masing daerahnya, dengan dijalankan oleh struktur pemerintahan terkait. Namun untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah masih harus mengalami suatu hambatan salah satunya adalah masalah kemiskinan.

Masalah kemiskinan ini sudah menjadi permasalahan yang kompleks dan umum serta sering terjadi pada negara berkembang seperti Indonesia. Jika masalah ini tidak cepat diatasi, bisa menyebabkan timbulnya permasalahan sosial hingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan menunjukkan suatu keadaan ketidakmampuan seseorang maupun kelompok masyarakat

dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum guna mencapai hidup yang layak. Kemiskinan ini disebabkan adanya perubahan sosial atau pembangunan yang menghalangi masyarakat untuk memiliki akses terhadap sumber daya, fasilitas maupun sarana perekonomian yang tersedia dengan merata dan adil (Ellah, 2015). Jadi kemiskinan ini tidak bisa diabaikan dan dibutuhkan suatu upaya yang sangat serius untuk mengatasinya sehingga diperlukannya campur tangan pemerintah dengan mengeluarkan suatu kebijakan.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, kebijakan pemerintah adalah memberikan banyak perhatian pada pembangunan daerah pedesaan, karena penduduk miskin tertinggi di Indonesia didominasi pada pedesaan dengan aktivitas ekonominya lebih banyak di sektor pertanian, sedangkan perkotaan didominasi oleh berbagai sektor seperti jasa, industri dan lainnya (Murdiyana & Mulyana, 2017). Angka kemiskinan di pedesaan tinggi karena disebabkan adanya perbedaan pendapatan masyarakat desa yang sangat rendah. Hal itu didukung oleh penelitian Nurjihadi (2017) yang menyatakan jika rendahnya pendapatan petani dikarenakan oleh beberapa penyebab lain yakni rendahnya posisi tawar, kurangnya akses pada sumber permodalan, dan kelembagaan yang lemah sehingga menyebabkan petani ini terperangkap pada lingkaran setan kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan telah menjadi fokus berbagai kebijakan pemerintah, salah satunya melalui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memberikan kewenangan - kewenangan sumber daya yang lebih besar kepada desa untuk mengelola pembangunannya sendiri melalui dua instrumen utama yaitu Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam Keputusan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang mengatur Dana Desa ini, telah menguraikan inisiatif pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Adapun definisi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer oleh pemerintah pusat untuk desa melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat. Hadirnya dana tersebut disalurkan maupun dialokasikannya secara berkeadilan ke desa (Sanjaya *et al.*, 2023).

Selanjutnya upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan tidak hanya melalui pemberian Dana Desa saja, namun juga melalui didirikannya BUMDes. Bersamaan dengan itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai lembaga ekonomi desa yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa untuk menggali potensi ekonomi lokal. Tujuan pendirian BUMDes adalah guna mengoptimalkan potensi ekonomi yang terdapat pada desa, meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun terdapat dua fungsi BUMDes untuk bisa meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa, yakni menjadi lembaga sosial dengan berperan sebagai penyedia pelayanan sosial serta lembaga komersil dengan tujuan memperoleh keuntungan dari penawaran sumber daya lokal (Fitriani *et al.*, 2020). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mengelola unit usahanya sendiri, hingga akhirnya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya di desa guna memperoleh tambahan pendapatan mereka (Pradnyani, 2019).

Pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kemiskinan tahun 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia ada sebanyak 9,36 persen atau 25,90 juta jiwa penduduk yang berada dalam kemiskinan. Apabila dilihat dari tingkat Provinsi, ada 16 Provinsi yang mempunyai tingkat kemiskinan lebih dari 10 persen. Salah satu provinsi tersebut yaitu Jawa Timur dengan tingkat kemiskinan sebanyak 10,35 persen. Tingkat kemiskinan ini masih diatas rata-rata tingkat kemiskinan Indonesia serta juga memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi se Indonesia yakni 4,188 juta jiwa. Menurut tipe daerahnya, penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur banyak terdapat di daerah pedesaan, adapun terdapat 2,485 juta jiwa penduduk miskin tinggal di pedesaan atau 13,98 persen sedangkan di perkotaan hanya sebanyak 1,703 juta jiwa atau 7,50 persen.

Provinsi Jawa Timur ini terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. Namun di penelitiannya ini akan berfokus pada 29 kabupaten dan 1 kota yang memiliki kriteria tertentu yakni terdapat penduduk miskin, memiliki desa, sebagai penerima dana desa dan memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sedangkan 8 kota lainnya tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah desa terbanyak ke dua se Indonesia yaitu sejumlah 8.493 desa. Banyaknya desa di Provinsi ini memiliki topografi wilayah seperti lembah, dataran, bukit dan lereng maupun puncak. Keberadaan topografi yang beragam tersebut menjadikan daerah ini mempunyai potensi ekonomi melimpah baik sumber daya manusia ataupun kekayaan alam seperti sektor pertaniannya, sektor kehutanannya, sektor kelautannya hingga perikananannya, sektor peternakannya, sektor perkebunannya dan sektor pertambangannya (BPS, 2023).

Dengan banyaknya sumber daya yang melimpah serta dilakukannya pemanfaatan maksimal, nantinya dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menambah pendapatan untuk membantu mengatasi kemiskinan itu. Namun ditemukan tingkat kemiskinan Provinsi ini ternyata masih tinggi. Berikut ini data kemiskinan Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023 :

Tabel 1.1 Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Timur 2018-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Persentase (%)
2018	4,292	10,85
2019	4,056	10,20
2020	4,586	11,46
2021	4,259	10,59
2022	4,236	10,49
2023	4,188	10,35

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah), 2025

Dari tabel 1.1 diatas, perkembangan angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur berfluktuasi. Sehingga diperlukannya kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan antar daerah yaitu dengan menaruh perhatian besar terhadap pembangunan dipedesaan. Salah satu bentuk campur tangan pemerintah adalah melalui kebijakan fiskal berupa kebijakan mengenai belanja (Girsang, W. 2011). Adanya anggaran belanja dapat meningkatkan pendapatan rill masyarakat miskin melalui kebijakan atau program yang dilakukan pemerintah seperti program bantuan tunai bersyarat atau tanpa syarat, atau melalui perluasan akses infrastruktur (Todaro & Smith, 2011). Kebijakan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Adapun usaha pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai kepanjangan tangan pemerintah nasional dalam menurunkan kemiskinan melalui kebijakan transfer Dana Desa. Dibawah ini data Dana Desa di Provinsi Jawa Timur:

Tabel 1.2 Dana Desa (DD) Tahun 2018-2023

Tahun	Dana Desa (Rupiah)
2018	6.331.294.016.104
2019	7.432.912.534.556
2020	7.568.223.613.378
2021	7.653.819.887.899
2022	7.752.526.921.267
2023	7.972.033.088.000

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (diolah), 2025

Besaran Dana Desa yang diperoleh Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018-2023 cukup besar dan selalu meningkat. Dengan pemberian Dana Desa ini dilakukan berdasarkan kebutuhan setiap desa yang akan dimanfaatkan untuk mengelola sumber daya desa serta diprioritaskan guna kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan. Hal itu diperkuat oleh penelitian terdahulu yang telah dijalankan Sunu & Utama (2019), dengan menyatakan jika Dana Desa guna pembangunan desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Artinya jika pemberian Dana Desa semakin tinggi maka akan semakin turun masalah tingkat kemiskinan tersebut.

Dalam menurunkan kemiskinan, upaya selanjutnya yaitu dengan dibentuknya suatu lembaga ekonomi desa yang bisa membantu menggerakkan perekonomian desa maupun masyarakat seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adapun dibawah ini terkait data jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah terbentuk di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 1.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun 2018-2023

Tahun	Badan Usaha Milik Desa (Unit)
2018	5.432
2019	5.909
2020	6.118
2021	6.363
2022	6.490
2023	6.638

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur (diolah), 2025

Dalam tabel 1.3 diatas terlihat jika jumlah BUMDes di Provinsi Jawa Timur selalu bertambah yang mana tahun 2023 ada sebanyak 6.638 unit BUMDes yang sudah terbentuk. Dengan hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut diharapkan bisa membantu meningkatkan pendapatan pada desa maupun masyarakat. Adapun penelitian yang sudah dijalankan oleh Salam & Marwini (2018) telah memberikan hasil bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu menjadikan masyarakat miskin menjadi sejahtera dengan mengembangkan usahanya secara optimal melalui penggalian potensi desa sehingga dapat dijadikan bisnis yang bisa memperoleh pendapatan desa yang bermanfaat dan menambah pendapatan bagi masyarakat. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian dari Jacob & Murdiyanti (2021) yang menunjukkan jika dengan hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberikan perubahan yang signifikan dari sisi ekonomi masyarakat desa melalui hasil usahanya baik pertanian dan usaha masyarakat lainnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selanjutnya penelitian ini hadir karena di Provinsi Jawa Timur yang terbagi menjadi kabupaten/kota masih adanya kemiskinan yang tinggi dengan didapati bahwa kemiskinan tersebut banyak di daerah pedesaan. Provinsi ini

memiliki karakteristik yang menarik untuk diteliti yang mana diberbagai wilayah memiliki kondisi geografis dan sosial ekonomi yang beragam. Dengan memungkinkan analisis yang komperhensif dalam menurunkan masalah kemiskinan yang didukung upaya dari pemerintah melalui pemberian transfer Dana Desa guna mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat hingga didukungnya pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna untuk menggerakan perekonomian desa yang dapat menambah pendapatan masyarakat sehingga dapat menurunkan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan potensi ekonomi desa. Dengan pemilihan variabel Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkait dengan pembangunan desa. Dimana hadirnya peran pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal guna mengatasi masalah kemiskinan. Hal ini ditunjukkan oleh nawacita butir ketiga yang menyatakan jika membangun Indonesia melalui pinggiran dengan memperkuat daerahnya dan desa didalam negara kesatuan (RPJMN, 2019).

Selain itu juga guna menjawab persoalan kemiskinan akibat pembangunan yang tidak merata serta memprioritaskan aktivitas ekonomi yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Dengan campur tangan atau komitmen pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa dan daerah sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional dalam menurunkan masalah kemiskinan melalui penggelontaran Dana Desa yang juga sebagai bentuk realisasi dari pemerataan pembangunan antar daerah terutama desa serta sebagai bentuk implementasi perundang-undangan desa untuk menjadikan desa sebagai tumpuan mempercepat pembangunan yang bisa membantu mengatasi masalah kemiskinan. Adapun juga didukung dengan

pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan begitu hadirnya Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat memberikan sumber daya langsung kepada desa-desa agar mereka dapat mengembangkan potensi ekonomi yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan desanya masing-masing.

Dengan Besaran Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbeda-beda di setiap daerah, tentu akan memberikan pengaruh yang berbeda juga terhadap upaya penurunan kemiskinan tergantung cara pengelolaannya. Pada uraian diatas juga telah dijelaskan bahwa beberapa penelitiannya masih terbatas di satu lingkup daerah dalam menjelaskannya pengaruh jumlah Dana Desa dan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur serta penelitian serupa belum banyak dilakukan di daerah ini. Adapun kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur ini dipilih untuk penelitian ini dikarenakan daerah tersebut memiliki potensi sumber daya melimpah sehingga dapat dimanfaatkan guna pembangunan ekonomi yang bisa digunakan untuk menurunkan masalah kemiskinan karena penelitian ini didasari pada adanya tingkat kemiskinan yang tinggi serta pertumbuhan signifikan Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Jawa Timur ini serta mengingat tingkat kemiskinan yang tersebar di setiap daerah berbeda-beda dan besaran Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga berbeda pula, maka penelitiannya ini berfokus untuk menganalisis Pengaruh Jumlah Dana Desa dan Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023?
2. Bagaimana pengaruh jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023?
3. Bagaimana pengaruh jumlah Dana Desa dan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara simultan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka tujuan adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah Dana Desa dan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara simultan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini harapannya bisa dipakai guna pengembangan ilmu ekonomi khususnya mengkaji kebijakan perencanaan dan pengelolaan anggaran mengenai pengaruh jumlah Dana Desa dan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menurunkan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini harapannya bisa dipakai guna bahan masukan serta bahan pertimbangan bagi pemerintah saat membuat kebijakan terkait penyaluran Dana Desa maupun pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menurunkan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.